

## **POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA DESA YANG DIPENGARUHI OLEH KIAI (Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan)**

**Farid Nurdiansyah**

14040254083 (Prodi S1-PPKn, FISH, Universitas Negeri Surabaya, e-mail : Fn26236@gmail.com)

**Warsono**

0019056003 (Dosen PPKn, FISH, Universitas Negeri Surabaya, e-mail : warsono@unesa.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kiai pada politik pemilihan Kepala Desa Bakalanpule. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian dilakukan di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dengan sampel sebanyak 266 dari 2625 warga desa yang terdaftar sebagai pemilih tetap pada pemilihan Kepala Desa Bakalanpule tahun 2016. Cara pengumpulan data berupa metode angket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor rata-rata yang diperoleh sebesar 196 dengan kategori tinggi. Dibuktikan dengan pengaruh Kiai yang masih kuat, bahwa masyarakat mempercayai Kiai yang memiliki karomah dan barokah yang menjadikan doanya dapat mudah diterima oleh masyarakat dengan mendapat skor sebesar 217 kategori sangat tinggi, maka calon Kepala Desa yang didukung oleh Kiai akan memenangkan pemilihan Kepala Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. Sehingga dalam penelitian ini Kepala Desa yang menang adalah calon yang didukung oleh Kiai. Selain itu, untuk terlibat dalam panitia pemilihan umum, respon masyarakat di desa Bakalanpule mendapatkan skor paling rendah yaitu sebesar 114 dengan kategori sedang. Hal tersebut karena faktor fisik lingkungan yang juga mempengaruhi partisipasi politik suatu masyarakat. Wajar jika warga desa Bakalanpule kurang mendapatkan pengetahuan tentang partisipasi politik, karena pada umumnya rutinitas ekonomi membuat pilihan politik bukan menjadi prioritas sehingga mempengaruhi cara pandang mereka terhadap politik.

**Kata Kunci:** *pengaruh Kiai, Pemilihan Kepala Desa.*

### **Abstract**

This study aims to find out the influence of Kiai on the politics of election of the Bakalanpule Village Chief. The type of research used is descriptive quantitative. The study was conducted in Bakalanpule Village, Tikung Subdistrict, Lamongan Regency, with a sample of 266 out of 2625 villagers registered as permanent voters in the election of the Bakalanpule Village Head in 2016. How to collect data in the form of questionnaire method. The results showed that the average score obtained was 196 in the high category. Evidenced by the influence of Kiai who are still strong, that the community trusts Kiai who have charisma and blessings that make their prayers easily accepted by the public by getting a score of 217 very high categories, the candidate of the Village Chief who is supported by Kiai will win the election of the Village Head of Bakalanpule Kecamatan Tikung Lamongan District. So that in this study the village head who won was a candidate supported by Kiai. In addition, to be involved in the general election committee, the response of the people in the Bakalanpule village received the lowest score of 114 in the medium category. This is due to physical environmental factors that also influence the political participation of a society. Naturally, the villagers of Bakalanpule lack knowledge about political participation, because in general economic routines make political choices not a priority so that they influence their perspective on politics.

**Keywords:** *influence of Kiai, Village Head Election.*

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, dimana rakyat mempunyai kedudukan yang tinggi dalam pemerintahan. Dalam pemerintahan demokrasi ini, rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Sistem pemerintahan demokrasi ditandai dengan adanya partisipasi rakyat dalam pemerintahan, salah satu bentuk partisipasi rakyat

dalam pemerintahan adalah dengan adanya jaminan kebebasan rakyat untuk memilih calon pemimpin yang sesuai dengan keinginan tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak luar mana pun.

Berdasar pola kehidupan sehari-hari yang sangat berbeda dengan pola hidup masyarakat di luarnya, pesantren dapat dikatakan sebagai subkultur, seperti komunitas pesantren menandai waktu tidak dengan istilah pagi, siang, sore, atau malam yang sering dipakai

masyarakat umum, namun dengan istilah berdasarkan siklus shalat lima waktu yaitu subuh, dhuhur, ashar, maghrib, dan isya. Keunikan pesantren menyangkut tata nilai, cara dan pandangan hidup, serta hirarki kekuasaan tertentu diantara santri (murid) dan pengasuh (kiai/guru) serta masyarakat sekitarnya. Namun, tidak berarti komunitas pesantren terpisah atau memisahkan diri dari lingkungan masyarakat di sekitarnya.

Pesantren mempunyai kekuatan yang dapat diandalkan, yaitu kiai sebagai pemimpin pesantren. Pesantren sendiri berperan sebagai institusi dan sistem. Terdapat dua hal yang mengakari kekuatan kiai yaitu kredibilitas moral dan kemampuan mempertahankan pranata sosial yang diinginkan. Gelar kiai tidak semata-mata diberikan pada ulama yang mempunyai kedudukan, wibawa dan pengaruh yang sama akan tetapi diberikan kepada masyarakat. Kewibawaan kiai juga bersumber dari kemampuan-kemampuan supranatural yang dimilikinya, meskipun sebenarnya sulit untuk membuktikan kebenarannya, namun kepercayaan masyarakat akan hal tersebut cukup besar dan sangat memengaruhi dalam menghimpun kekuatan kiai. Pada saat seperti ini kemampuan kiai pesantren telah terbukti dalam mengontrol nilai dan kebudayaan. Seberapa deras arus informasi yang masuk pesantren, kiai tidak akan pernah kehilangan peranannya selama masih mampu menjaga pranata-pranata sosial dan perlunya perhatian dari tokoh-tokoh lain untuk memperkuat kiai dalam menjaga pranata-pranata tersebut.

Kepemimpinan Kiai di pesantren diakui cukup efektif untuk meningkatkan citra pesantren tersebut dimata masyarakat luas. Kemasyhuran pesantren biasanya berbanding lurus dengan nama besar Kiainya terutama kiai pendiri pesantren tersebut. Sosok Kiai di pesantren tidak hanya selaku guru yang mengajarkan agama tetapi juga menjadi figur pemimpin yang mampu mengarahkan para santri dan pengikut atau pendukungnya dalam menempuh jalan hidup dan kehidupan mereka sehari-harinya.

Di Indonesia peran Kiai cukup berpengaruh dalam kehidupan baik di bidang sosial, ekonomi maupun politik. Kiai adalah tokoh yang mempunyai posisi yang strategis dan sentral dalam masyarakat. Posisi mereka terkait kedudukannya sebagai orang terdidik dan kaya dalam masyarakat. Sebagai orang terdidik kiai memberikan pengetahuan Islam kepada para santri. Pesantren sebagai lembaga Pendidikan Islam tradisional adalah sarana penting untuk melakukan transfer pengetahuan terhadap para santri. Dengan kekayaan yang dimilikinya kiai menjadi patron kepada siapa santri bergantung. Keterlibatan kiai dalam aktivitas politik negara bukanlah hal baru. Sejak berlangsungnya pemilihan umum pertama pada tahun 1955 hingga pemilihan umum terakhir pada

tahun 2009, dunia politik di Indonesia senantiasa dimeriahkan oleh para kiai. Demikian pula dengan pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah secara langsung yang dimulai sejak tahun 2004 dan tahun 2009, kiai semakin memainkan peran aktifnya. Para kiai memandang bahwa tidak ada garis pemisah antara agama dengan politik.

Jumlah pemilih di Desa Bakalanpule yang terdaftar dalam (Daftar Pemilih Tetap) DPT Pilkades Bakalanpule Kecamatan Tikung 2016 ada 2.645 orang. Sebanyak 89% dari 2.645 orang menggunakan hak pilihnya sedangkan 11% dari yang terdaftar dalam DPT tersebut tidak menggunakan hak pilihnya. Pada Pilkades Bakalanpule Kecamatan Tikung 2016 terdapat dua pasangan calon yaitu Bapak Sutrisno dan Bapak Zamroni. Dari kedua pasangan calon Kepala Desa tersebut, Bapak Zamroni sangat dekat dengan Kiai yang ada di desa Bakalanpule. Hal tersebut dibuktikan dengan rutinnnya Bapak Zamroni berkunjung ke Pondok Pesantren Al Futuh di Dusun Sekargeneng. Pada saat menjelang Pilkades pun Bapak Zamroni mendatangi Kiai untuk meminta doa restu. Dibawah ini adalah tabel hasil perhitungan suara sah Pemilihan Kepala Desa Bakalanpule tahun 2016:

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Sah Pemilihan Kepala Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan tahun 2016

No	Nama Calon	Perolehan Suara				Jumlah Total Suara Sah
		Dsn Pule	Dsn. Bakalan	Dsn. Tikung	Dsn. Sekar geneng	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sutrisno	518	153	88	70	829
2.	Zamroni	531	537	292	164	1524

Dilihat dari perkembangannya, posisi kiai untuk meningkatkan partisipasi politik sudah mulai ada pergerakan ke arah yang lebih baik. Banyak kiai yang juga menjadi pemimpin di sebuah pemerintahan seperti di DPR dan DPRD. Kabupaten Gresik pernah di pimpin oleh seorang kiai bernama Drs Robbach Ma'sum, MM pada tahun 2000-2005, sedangkan sebelum menjabat sebagai Bupati Gresik, beliau menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Gresik pada tahun 1999-2000.

Pondok pesantren Al-Futuh adalah salah satu pondok pesantren yang berbasis Nahdatul Ulama yang memiliki cukup banyak jamaah di lingkungan masyarakat. Pondok pesantren Al Futuh mulai dibangun pada tahun 1990 dan diresmikan pada tahun 1991. K.H. Abdullah Hasan merupakan pendiri pondok pesantren Al Futuh yang terletak di dusun Sekargeneng desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. Selain itu, pondok pesantren dan jamaahnya rutin setiap satu tahun sekali mengadakan acara ziarah wali songo (sembilan) dan wisata ke pulau Bali (ziarah wali) untuk menghormati para leluhur terdahulu, sehingga sedikit banyak jamaah

mengetahui tentang bentuk sejarah agama Islam. Maka tidak heran ketika ada politisi dari partai yang berlatar belakang NU bahkan yang lain sering mendatangi pondok untuk meminta restu maupun dukungan untuk pencalonan legislatif maupun eksekutif. Hal tersebut sudah menjadi tradisi dari dulu sampai sekarang.

Kiai yaitu pemimpin non formal sekaligus pemimpin spiritual, dan posisinya sangat dekat dengan kelompok-kelompok masyarakat lapisan bawah di desa-desa sebagai pemimpin masyarakat, Kiai memiliki Jemaah komunitas dan massa yang diikat oleh hubungan keguyuban yang erat dan ikatan budaya paternalistik. Petuah-petuahannya selalu didengar, diikuti dan dilaksanakan oleh Jemaah, komunitas, dan massa yang dipimpinnya.

Kiai yang hidup di tengah-tengah masyarakat menentukan proses interaksi dengan masyarakat sekitarnya. Kiai dan masyarakat lebih mudah berinteraksi. Proses itu menjadikan kiai relatif lebih memahami kehidupan masyarakat. Keluasan pengetahuan tentang ke-Islaman menjadikan kiai sebagai tempat bertanya dalam berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.

Tidak sedikit umat dari beraneka latar belakang berusaha sowan ke Kiai untuk mengharap berkah, berkonsultasi sesuai dengan kepentingan masing-masing. Petani yang selalu dihadapkan pada ketergantungan dengan ekologi, hama yang tiba-tiba menyerang tanaman yang siap panen, dan regulasi pemerintah yang sulit diterima oleh nalar petani misalnya harga gabah rendah tetapi di sisi lain pemerintah menetapkan regulasi mengimpor beras sehingga harga gabah turun. Begitu pula dengan para pejabat pemerintah sipil maupun militer yang bermasalah dalam aspek persaingan karir, kesulitan dalam peningkatan karir, rekrutmen jabatan, dan dukungan politik sowan ke Kiai untuk menyelesaikan masalah. Karena menurut nalar mereka, kiai dapat memberikan amalan yang bisa memenuhi kepentingan mereka. Seperti dua presiden pernah bersilatirahim ke Pesantren Besuk, yaitu Gus Dur dan Susilo Bambang Yudhoyono. Gus Dur sebagai Presiden datang ke Pesantren Besuk yang dihadiri oleh ribuan ulama dan aparat birokrasi. Kehadiran Gus Dur memantapkan kedudukan politik KH. Mas Muhammad Subadar di tingkat nasional. SBY datang pada saat kampanye putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 06 September 2004. Seminggu setelah dilantik, Kiai Subadar diundang ke Cikeas dan menyatakan selamat atas keberhasilan SBY serta mengingatkan janji-janji sewaktu kampanye. Realitas itu semakin semakin memantapkan kedudukan politik Kiai Subadar sebagai kiai nasional. Kharismanya menembus batas administratif Pasuruan dan Jawa Timur. Kehadiran Presiden di pesantren sebagai paspor menuju puncak, yaitu menjadi Kiai Nasional. Menurut Bustami (2009: 113) bahwa pengajian sering dijadikan sebagai

kampanye politik untuk mendukung dan menolak pejabat. Salah satu contohnya adalah materi pengajian KH. Manaf, Pesantren Darul Ulum, Desa Rebalas, Kecamatan Grati menyatakan bahwa, "situasi Pasuruan yang memanas yang dipicu masalah suksesi semestinya bisa diselesaikan dengan cara pihak pro dan yang kontra melakukan dialog. Dari dialog itu akan tercipta suasana yang sejuk dan tenang. Kalaupun tetap menghendaki suksesi harus sesuai dengan konstitusi, tidak grusa-grusu. Masing-masing pihak menyeleksi kader terbaiknya. Setahu saya, pihak yang kontra belum ada kader putra daerah kalau tokh ada dibawah Pak Dade. Mekanisme seleksi bupati sangat penting"

Berdasarkan aktivitas keseharian para Kiai, masyarakat menyatakan bahwa kiai terbagi ke dalam lima varian (Bustami, 2009: 42), yaitu kiai politik, kiai spiritual, kiai morok, kiai tarekat, dan kiai panggung. Kiai politik dibagi lagi dalam sub varian, yaitu kiai sebagai pengurus partai politik, kiai sebagai anggota DPRD, kiai sebagai ulama reaksi cepat (URC) yang berperan sebagai makelar jabatan politik dan proyek, dan kiai yang berpolitik tetapi tidak mempunyai pedoman berpolitik yang disebut tikmapolitik. Dalam praktiknya seorang kiai politik bisa berperan sebagai pengurus politik, anggota DPRD, dan makelar jabatan politik dan proyek.

Kiai spiritual adalah kiai yang mempunyai kekuatan supranatural dari Allah SWT yang dikenal dengan ilmu kasyaf (mengetahui sebelum kejadian) dan masyarakat mengakui cocok saat berkonsultasi kepada beliau. Kiai morok adalah kiai yang mengajarkan al-Quran di mushola atau di rumah kiai itu sendiri. Kiai tarekat adalah kiai yang disahkan sebagai mursyid, muqaddam tarekat dengan silsilah yang sah. Kiai panggung adalah kiai yang mempunyai keahlian untuk ceramah ke-Islaman di forum pengajian, majelis taklim dan memenuhi undangan menjadi penceramah dalam upacara keagamaan dan kenegaraan (nasional).

Menurut masyarakat kedudukan Kiai spiritual, Kiai tarekat, Kiai morok masih dijadikan sebagai panutan dalam menyelesaikan beberapa masalah. Mereka diyakini menerapkan wira'i (hati-hati), qanaah (sederhana, secukupnya), dan zuhud (hidup sebagai kehidupan yang fana sehingga lebih berorientasi kepada kehidupan akhirat). Kiai-kiai tersebut dalam berpolitik berada di balik layar dengan tujuan merangkul umat. Kiai politik yang aktif di parpol, DPRD, apalagi URC mendapatkan penghormatan yang relatif rendah karena berada dalam kegiatan abu-abu (syubhat).

Para kiai mempunyai pilihan berpolitik yang bervariasi pula. Variasi itu terjadi disebabkan oleh acuan berpolitik kiai adalah berdasarkan illat dan kaidah ushul fikih yang digunakan berbeda. Kiai menerapkan politik tabarukan, politik makmum, politik istiqomah, politik nafsi-nafsi, dan

politik makrifat. Politik tabarukan adalah pilihan politik yang ditentukan berdasarkan pilihan politik gurunya sewaktu nyantri dan pilihan anak kiai yang dihormatinya. Politik makmum adalah penentuan politik berdasarkan kepentingan patron politiknya. Politik istiqomah adalah penentuan politik yang ajeg sebagai pendukung partai yang didukung oleh ulama, yaitu Partai NU, PPP, dan PKB. Politik nafsi-nafsi adalah penentuan politik secara otonom terserah individu masing-masing. Politik makrifat artinya, kiai itu tidak terjun dalam politik praktis dan menjelaskan serta memberikan pernyataan dalam politik tanpa panggung, sewaktu orang sedang berkonsultasi atau dengan simbol salam dari kiai fulan. Perbedaan itu tidak menyebabkan perpecahan melainkan mengedepankan sikap tawadhu' dan saling menghormati (berkumpul tidak bersatu, berpecah tidak berpisah, dan tidak ada lawan dan kawan yang abadi, yang abadi hanya kepentingan). Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan pengaruh interpersonal, melalui komunikasi, kearah pencapaian tujuan. Kepemimpinan adalah hubungan dimana satu orang, pemimpin mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama dengan rela pada tugas-tugas terkait untuk mencapai apa yang diinginkan pemimpin.

Batasan-batasan di atas mencerminkan bahwa menyangkut sebuah proses pengaruh sosial yaitu pengaruh yang disengaja dijalankan seseorang terhadap orang lain untuk menstruktur aktivitas-aktivitas serta hubungan-hubungan dalam sebuah kelompok atau organisasi. Dengan demikian, kepemimpinan dapat diartikan sebagai masalah relasi dan pengaruh antara pimpinan dan orang yang dipimpin. Kepemimpinan tersebut muncul dan berkembang sebagai hasil dari komunikasi interaktif antara pemimpin dan yang dipimpin.

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi, mengorganisir, menggerakkan, mengarahkan atau mempengaruhi orang lain (bawahan) untuk melaksanakan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan. Setidaknya ada lima unsur-unsur dalam kepemimpinan, unsur-unsur dimaksud yaitu a) Adanya seorang yang berfungsi memimpin, yang disebut pemimpin, b) Adanya orang lain yang dipimpin, c) Adanya kegiatan menggerakkan orang lain yang dilakukan dengan mempengaruhi dan mengarahkan perasaan, pikiran, dan tingkah lakunya, d) Adanya tujuan yang hendak dicapai, baik yang dirumuskan secara sistematis maupun bersifat seketika, e) Berlangsung berupa proses di dalam kelompok/organisasi, baik besar dengan banyak maupun kecil dengan sedikit orang yang dipimpin.

Sedangkan istilah Kiai bukan berasal dari Bahasa Arab melainkan dari Bahasa Jawa. Kata Kiai memiliki definisi yang majemuk. Kata Kiai bisa berarti: 1) sebutan bagi alim ulama (cerdik pandai dalam agama Islam); 2) alim ulama; 3) sebutan bagi guru ilmu gaib (dukun dan sebagainya); 4) kepada distrik (di Kalimantan Selatan); 5) sebutan yang mengawali nama benda yang dianggap berbuah (senjata, gamelan, dan sebagainya); dan 6) sebutan samara untuk harimau (jika orang melewati hutan). Selain itu, di daerah Jawa perkataan Kiai dipakaidalam bahasa Jawa untuk tiga jenis gelar, yaitu : Sebutan gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat, misalkan Kiai Garuda Kencana dipakai untuk sebutan Kereta Emas yang ada di Keraton Yogyakarta, Gelar kermatan untuk orang-orang tua pada umumnya, Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pemimpin pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada para santrinya. Selain gelar Kiai, ia juga sering disebut seorang 'alim (orang yang dalam pengetahuan Islamnya).

Pada umumnya pemakaian kata Kiai sering diparalelkan dengan kata ulama, yang merupakan istilah yang ditransfer dari dua sumber skriptural Al Qur'an dan al Sunnah. Kiai dan ulama berbeda asal usulnya bahasanya, tetapi memiliki kualitas yang relatif sama. Keduanya memiliki krakter fundamental memperdalam Pendidikan. Gelar Kiai ini tidak bisa diusahakan melalui jalur-jalur Pendidikan formal semacam sarjana misalnya, namun gelar ini datang sendiri dari ajaran-ajaran dan pandangan Islam melalui kegiatan. Namun, pengertian paling luas di Indonesia, sebutan Kiai dimaksudkan untuk para pendiri dan pemimpin pesantren, yang sebagai muslim terpelajar telah membatikan hidupnya untuk Allah serta menyebarluaskan dan yang berkualitas tinggi dalam hal iman, takwa, dan ilmu sebagai ciri khas masyarakat yang secara tulus memberikannya tanpa intervensi pengaruh-pengaruh pihak luar. Kehadiran gelar ini akibat kelebihan-kelebihan ilmu dana mal yang tiak dimiliki lazimnya orang, dan kebanyakan didukung pesantren yang dipimpinya.

Berdasarkan paparan mengenai kepemimpinan dan Kiai, maka dapat kita artikan bahwa kepemimpinan Kiai sebagai seni yang memanfaatkan seluruh daya (dana, sarana, dan tenaga) pesantren untuk mencapai tujuan pesantren. Kepemimpinan Kiai juga dapat digambarkan sebagai sosok Kiai yang kuat kecakapan dan pancaran kepribadiannya sebagai seorang pemimpin an pesantren, yang hal itu menentukan kedudukan dan kaliber suatu pesantren. Kemampuan Kiai menggerakkan massa yang bersimpati dan menjadi pengikutnya akan memebrikan peran strategis baginya sebagai pemimpin informal

masyarakat melalui komunikasi intensif dengan penduduk yang mendukungnya.

Kharisma Kiai memperoleh dukungan masyarakat hingga batas tertentu, karena dia dipandang memiliki kemantapan moral dan kualitas iman yang melahirkan model kepribadian magnetis bagi para pengikutnya. Proses ini mula-mula beranjak dari kalangan terdekat, sekitar kediamannya, kemudian melebar keluar menuju tempat-tempat yang jauh, seperti kharisma KH. Ahmad Dahlan, KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Wahab Chasbullah di Jombang, KH. Kholil Bangkalan dan KH.R. As'ad Syamsul Arifin dari Situbondo dan beberapa kiai lain, terutama mereka yang berafiliasi pada organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Kharisma yang dimiliki Kiai tersebut dalam sejarahnya mampu menjadi sumber inspirasi perubahan dalam masyarakat.

Kepemimpinan Kiai yang timbul sebagai pendiri pesantren yang bercita-cita tinggi dan mampu mewujudkannya. Kepemimpinan ini biasanya didasarkan pada tempaan pengalaman dan dilandasi keunggulan-keunggulan potensial dalam pribadinya sehingga dapat mengalahkan pribadi-pribadi di sekitarnya dan bisa diterima di masyarakat sejak ratusan tahun silam. Kepercayaan masyarakat adalah suatu keyakinan bahwa pernyataan dari pihak-pihak lain dapat diandalkan dalam pelaksanaannya tentang suatu hal yang telah ia janjikan. Kepercayaan masyarakat yang muncul dalam pemikiran setiap individu dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu informasi, pengaruh, dan pengendalian. Kepercayaan masyarakat akan meningkat jika informasi yang didapatkan oleh mereka dinilai akurat, pengaruh yang ditimbulkan oleh pihak yang menjajikan kepercayaan tadi dinilai menimbulkan dampak yang positif bagi masyarakat, dan pengendalian yang dijalankan oleh pihak lain tidak menguntungkan salah satu pihak namun juga menguntungkan seluruh lapisan masyarakat. (Soekanto, 2002:6)

Dalam kemunculan tokoh agama yang sering disebut dengan ulama, masyarakat kemudian mempercayai dan meyakini tokoh agama itu sendiri. Keyakinan masyarakat bermacam-macam bentuknya. Ada yang sekedar memiliki keyakinan bahwa tokoh agama tersebut hanya sebagai orang yang dapat menjadi tempat bertanya dan berdiskusi tentang agama, hingga ketika seseorang yang meyakini tokoh agama sebagai seseorang yang penting atau yang ikut andil dalam pengambilan keputusan dalam hidupnya.

Hingga saat ini kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agama masih kental dan terjadi pada sebagian besar warga masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan oleh berbagai aktivitas yang mengurus tenaga dan pikiran belum lagi masalah yang muncul dalam diri pribadi atau dalam keluarga, sehingga masyarakat pada umumnya menginginkan kesejukan, ketenangan dalam masing-

masing pribadi yang menimbulkan keyakinan atau kepercayaan terhadap seorang tokoh agama itu sendiri dalam setiap individu.

Menurut Bustami (2009: 93-94) seorang Kiai memiliki kekuatan supranatural yaitu karomah dan barokah sehingga bisa memahami sesuatu di balik sesuatu dan bisa memberikan peringatan berupa malate atau menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Karomah bisa dirasakan dan dialami oleh seseorang yang hanya yakin saja, dan keyakinan, masyarakat adalah sebuah barokah milik siapa saja. Artinya, setiap orang melakukan tabarukan atau mengambil barokah kepada kiai tertentu untuk mendapatkan tambahan kebaikan.

Hubungan personal antara kiai dan umat diikat dalam kemampuan memberikan barokah, karomah, dan upacara keagamaan sehingga semua pernyataan, fatwa, dan nasihat harus diterima secara pasif (mendengar dan mengerjakan).

Kepercayaan politik masyarakat merupakan komponen kognitif dari sikap masyarakat itu sendiri, dalam artian masyarakat mampu menilai baik dan buruknya dari pelaksanaan sistem politik yang dijalankan oleh suatu pemerintahan, sehingga masyarakat mampu mengambil sikap untuk ikut serta dalam artian yang aktif dalam pelaksanaan politik tersebut, atau hanya sebagai pelaku pasif dari kebijakan-kebijakan politik yang disahkan oleh pemerintah.

Kepercayaan politik yaitu angan-angan atau lebih tegasnya merupakan "buah pikiran nasional" seluruh warga bangsa, hasil konsensual dari sebuah kontrak social dalam sejarah pendirian Negara-bangsa sejak awal, tentang jalan politik dunianya secara umum.

Jadi, pada dasarnya kepercayaan politik merupakan keyakinan yang dimiliki oleh segenap elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga dan mempertahankan elektabilitas bangsa itu sendiri, sehingga akan tercipta sikap saling percaya antara masyarakat dengan pemerintah yang menjadi ujung tombak berjalannya sebuah sistem pemerintahan. Sedangkan kepercayaan masyarakat terhadap elit politik pada dasarnya adalah anggapan atau keyakinan bahwa para elit politik yang mewakili kepentingan masyarakat dalam pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan program-program yang pada akhirnya untuk kepentingan rakyat.

Pada dasarnya ilmu politik memusatkan perhatiannya kepada sekelompok masalah yang melibatkan perjuangan kekuasaan dalam kehidupan masyarakat, wujudnya adalah usaha-usaha untuk memperoleh kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan, sehingga ilmu politik bukan membahas gejala alam, yaitu gejala-gejala namun membahas gejala-gejala sosial yang berkisar pada perjuangan manusia yang berusaha memperoleh kekuasaan (bagi yang belum memiliki atau

mempertahankan kekuasaan, bagi yang sudah memiliki) guna mencapai suatu maksud yang diinginkan. Gejala-gejala politik adalah pemikiran luas sehingga, sehingga Ilmu Politik menjadi suatu ilmu yang lingkupnya sangat luas. Lingkupan yang cukup luas mungkin dipelajari sarannya sekaligus. Menurut Dillon dalam Budiyo (2012:19) Ilmu Politik dibagi menjadi sembilan kelompok yaitu (1) *Political Theory*, (2) *Political Parties*, (3) *Public Administration*, (4) *International Relations and politics*, (5) *International Organisation*, (6) *Public Opinion and Propaganda*, (7) *Comparative Government*, (8) *State and Local Government*, dan (9) *Certain Phases of Law, such as Administrative, Constitutional and International Law*. Batas dan susunan Ilmu Politik cenderung untuk untuk selalu meluas. Menurut menurut Ramlan Surbakti (2010: 81) kepala desa adalah penguasa tunggal dalam pemerintahan desa dalam melaksanakan dan menyelenggarakan urusan rumah tangga desa dan disamping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah, meskipun demikian didalam melaksanakan tugasnya ia mempunyai batas-batas tertentu, ia tidak dapat menuruti keinginannya sendiri.

Herbet Mc. Closky, dalam (Budiarjo, 1994:1) mendefinisikan “partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum”. (*The term “Political participation” will refer to thos voluntary activities by which members of a society share in the formation of public policy*). Sedangkan menurut Nie dan Verba dalam (Budiarjo, 1982) menyebutkan “partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga Negara yang legal yang sedikit banyaknya langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat Negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka”. (*By political participation we refer to thos legal activities by private citizens which are more or less directly almed at influencing the selection of govermental personal and/or the actions they take*).

Menurut Samuel P. Huntington dan dan Joan M. Nelson (1990:3) bahwa “Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi biasanya bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif”. (*By Political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or not effective*).

Partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam proses penyelenggaraan pemilu, seperti mengikuti kampanye politik, memeberikan suara, dan bekerja dalam suatu pemilihan, Budiarjo (1994:12) mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik. Menurut Surbakti (2010:140) partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting demokrasi yang diartikan sebagai keikutsertaan warga negara (rakyat) dalam menentukan segala keputusan pemerintah yang menyangkut atau mempengaruhi kehidupannya.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses kegiatan dan tahapan pemilihan umum seperti menghadiri atau mengikuti kegiatan kampanye, terlibat sebagai panitia pemilihan umum, dan memberikan hak suara dalam pemilihan umum.

Dari sisi tipologi, partisipasi politik dibedakan menjadi dua yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif (Surbakti, 2010:142). Pada kategori partisipasi aktif antara lain yaitu mengajukan usulan mengenai suatu kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan, membayar pajak, dan memilih pemimpin pemerintah. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif adalah diantaranya berupa kegiatan yang mentaati pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

Partisipasi politik aktif menunjukkan kegiatan yang berorientasi pada input dan output politik, sedangkan partisipasi politik pasif merupakan kegiatan yang hanya berorientasi pada proses output. Disamping itu, terdapat sejumlah anggota masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori partisipasi politik aktif maupun partisipasi politik pasif. Kelompok ini muncul didaarkan pada pandangan mereka yang menganggap masyarakat dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan. Kelompok tersebut disebut sebagai kelompok apatis atau disebut juga sebagai golongan putih (golput).

Partisipasi politik masyarakat sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keyakinan agama yang diminati oleh individu. Sebagai contoh Islam dapat mendorong pemeluknya untuk memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, mengkritik, dan mengawasi penguasa. Hal tersebut merupakan dorongan internal dalam melakukan partisipasi politik. Faktor jenis individu yaitu laki-laki atau perempuan, juga memiliki pengaruh besar terhadap partisipasi di sebagai masyarakat. Demikian juga dengan pendidikannya sehingga hal tersebut dapat disebut sebagai faktor-faktor sosial. Jenis kultur politik atau bentuk nilai dan keyakinan tentang kegiatan politik yang memengaruhinya. Terkadang

kultur politik mendorong seseorang untuk berpartisipasi politik secara aktif, namun terkadang justru menjadikan seseorang buta politik. Karakter lingkungan politik, bahwa didalam masyarakat yang menghormati supremasi hukum dan kebebasan politik, sistem politiknya bersifat multipartai, mengakui hal kritik dan partisipasi rakyat, serta banyak memberikan kesempatan kepada anggota masyarakatnya untuk melakukan partisipasi dalam kehidupan bernegara. Demikian pula dengan keberadaan partai-partai yang dengan segala keberagamannya berarti memberi jaminan atas adanya oposisi yang institusional dimana mereka melakukan partisipasi politik serta ikut mengambil keputusan, sehingga ideologi dan system politik masyarakat memberikan pengaruh besar kepada partisipasi warganya.

Partisipasi politik memenuhi empat macam fungsi, diantaranya yaitu 1) sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi, partisipasi politik sering kali muncul dalam bentuk upaya-upaya menjadikan arena politik untuk memperlancar usaha ekonominya atau sebagai sarana untuk mencari keuntungan material, 2) sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial, yaitu memenuhi kebutuhan akan harga diri, meningkatnya status sosial, dan merasa terhormat karena bergaul dengan pejabat-pejabat terkemuka dan penting. Pergaulan yang luas bersama pejabat-pejabat itu pula yang mendorong partisipasi seseorang untuk terlibat dalam aktivitas politik sehingga dengan demikian orang-orang tersebut akan puas bahwa politik dapat memenuhi kebutuhan terhadap penyesuaian sosialnya, 3) sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus, dalam hal ini orang berpartisipasi dalam politik dianggap dapat dijadikan sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu seperti untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan proyek dan tender, melicinkan karier bagi jabatannya. Nilai-nilai khusus dan kepentingan individu tersebut apabila tercapai, akan semakin mendorong partisipasinya dalam berpolitik, dan 4) sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi tertentu, seperti kepuasan batin, perasaan terhormat, merasa menjadi sosok yang penting dan dihargai orang lain dan kepuasan-kepuasan atas target yang telah ditetapkan.

Politik masyarakat memiliki peran serta yang didasarkan kepada politik untuk menentukan suatu produk akhir. Sehingga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik, seperti suatu komunikasi yang mempunyai konsekuensi politik untuk mengatur perilaku manusia dalam keberadaan suatu konflik baik secara aktual maupun secara potensial, komunikasi politik antara rakyat dan pemerintah sebagai interaksi antara dua pihak yang menerapkan etika. Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan akan menentukan corak dan arah suatu

keputusan yang akan diambil, dan faktor fisik individu sebagai sumber kehidupan termasuk fasilitas serta ketersediaan pelayanan umum. Faktor lingkungan adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya keadaan, kondisi dan makhluk hidup, yang berlangsungnya berbagai kegiatan interaksi social antara berbagai kelompok beserta Lembaga dan pranatanya.

Menurut Ramlan Surbakti (2010: 81) kepala desa adalah penguasa tunggal dalam pemerintahan desa dalam melaksanakan dan menyelenggarakan urusan rumah tangga desa dan disamping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah, meskipun demikian didalam melaksanakan tugasnya ia mempunyai batas-batas tertentu, ia tidak dapat menuruti keinginannya sendiri.

Kepala desa merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban. Disamping itu kepala desa juga mengemban tugas membangun mental masyarakat desa baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan.

Kepala desa merupakan seseorang yang memimpin pemerintahan desa dan melaksanakan segala tugas yang dibebankan oleh pemerintah yang lebih atas serta membimbing dan mengawasi segala usaha dan kegiatan masyarakat dan organisasi-organisasi serta lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepala desa yaitu orang yang bergerak lebih awal, memelopori, mengarahkan, membimbing, menuntun dan menggerakkan masyarakatnya melalui pengaruhnya dan sekaligus melakukan pengawasan terhadap tingkah laku masyarakat desa yang dipimpinnya.

Mengenai asas pemilu di Indonesia dikenal ada beberapa asas pemilu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Pemilu yang berlaku di Indonesia. Asas-asas pemilu menurut UU No. 23 tahun 2003, tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam UU No. 23 / 2003, asas pemilihan umum meliputi: a) Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai kehendak hati nuraninya tanpa perantara, b) Umum, artinya semua WN yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian), c) Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun atau dengan apapun, d) Rahasia, artinya rakyat pemilih di jamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan

apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (secret ballot), e) Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas, dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, f) Adil, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Pemilihan kepala desa bertujuan untuk memilih calon kepala desa yang bersaing dalam pemilihan kepala desa untuk dapat memimpin desa. Pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa yang terdaftar dengan memilih langsung calon kepala desa yang dianggap oleh masyarakat mampu membawa aspirasi masyarakat dan pembangunan desanya.

Pemilihan kepala desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa yang diatur dalam pasal 46 ayat 1 dan 2, yakni :1) Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat, 2) Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Kepala Desa dipilih berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk desa warga Negara Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 17 tahun atau telah/pernah kawin. Dalam rangka pemilihan Kepala Desa yang dimaksud dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia adalah sebagai berikut: 1) Asas Langsung berarti pemilih mempunyai hak suara langsung memberikan suaranya menurut hatinya tanpa perantara dan tanpa tingkatan, 2) Asas Umum berarti pada dasarnya semua penduduk desa WNI yang memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya telah berusia 17 tahun ataupun telah/pernah kawin berhak memilih dalam pemilihan Kepala Desa. Jadi, pemilihan bersifat umum berarti pemilihan yang berlaku menyeluruh bagi semua penduduk desa warga Negara Indonesia menurut persyaratan tertentu tersebut di atas, 3) Asas Bebas berarti pemilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk menetapkan pilihannya sendiri tanpa adanya pengaruh tekanan dari siapapun dan dengan apapun, 4) Asas Rahasia berarti pemilih dijamin oleh peraturan perundang-undangan bahwa suara yang diberikan dalam pemilihan tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan jalan apapun.

Teori yang digunakan adalah teori otoritas Max Weber. Teori otoritas adalah pendekatan teoritis dalam memahami kepercayaan para pengikut akan legalitas terhadap aturan-aturan dan hak-hak mereka yang diatur oleh pemimpin dalam sebuah birokrasi. Ide dasar dari teori otoritas adalah demokrasi sebagai bentuk politik, demokrasi menawarkan dinamika maksimal dan

merupakan milieu terbaik untuk menciptakan pemimpin politik. Weber mencatat struktur otoritas hadir di setiap institusi sosial, yang menjadi pokok adalah tiga dasar yang digunakan para pengikut (masyarakat) untuk melegitimasi sebuah otoritas, yang pertama adalah otoritas legal dimana otoritas ini dapat memiliki berbagai macam bentuk struktural, namun bentuk yang dipandang paling murni dari dijalankannya otoritas legal adalah birokrasi. Dari sudut pandang teknis murni, birokrasi mampu mencapai tingkat efisiensi tertinggi, dan dalam hal ini secara formal dikenal sebagai sarana paling rasional untuk menjalankan otoritas terhadap manusia. Kedua yaitu otoritas tradisional, jika otoritas legal tumbuh dari legitimasi sistem rasional legal, maka otoritas tradisional didasarkan pada klaim pemimpin dan keyakinan para pengikutnya bahwa terdapat kelebihan dalam kesucian aturan dan kekuasaan yang telah berusia tua. Pemimpin dalam sistem seperti itu bukanlah penguasa superior melainkan personal. Ketiga, otoritas kharismatik dimana kharisma merupakan kekuatan revolusioner, jika otoritas tradisional jelas sangat konservatif, maka lahirnya pemimpin kharismatik sangat mungkin menjadi ancaman bagi sistem tersebut sekaligus membawa perubahan dramatis pada sistem tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kiai pada politik pemilihan Kepala Desa.

## METODE

Pada penelitian kuantitatif ini menggunakan metode deskriptif (*Descriptive Research*). metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek-subjek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Fokus penelitian ini yaitu tentang pengaruh seorang Kiai pada suatu daerah terhadap politik masyarakat Kecamatan Tikung yang digunakan dalam pemilihan Kepala Desa. Penelitian ini menggunakan Teknik sampling yaitu *cluster random sampling* (area sampling). *Cluster random sampling* (area sampling) ini merupakan Teknik sampling daerah yang digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang diteliti atau sumber data sangat luas, dimana penyampelan menggunakan 10% dari jumlah warga masyarakat di setiap dusun yang sudah terdaftar dalam DPT. Dusun tersebut terdiri dari dusun Pule, Bakalan, Tikung, dan Sekargeneng.

Fokus penelitian pada dasarnya yaitu segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini variabel penelitiannya adalah pengaruh Kiai pada masyarakat di Desa Bakalanpule. Dimana Kiai dimaksudkan untuk para pendiri dan pemimpin pesantren, yang sebagai muslim terpelajar telah membatikan hidupnya untuk Allah serta menyebarkan dan yang berkualitas tinggi dalam hal iman, takwa, dan ilmu sebagai ciri khas masyarakat yang secara tulus memberikannya tanpa intervensi pengaruh-pengaruh pihak luar. Kharisma Kiai memperoleh dukungan masyarakat hingga batas tertentu, karena dia dipandang memiliki kemantapan moral dan kualitas iman yang melahirkan model kepribadian magnetis bagi para pengikutnya.

Tabel 2. Pengelompokan sampel

Desa	Dusun	Jenis Kelamin	Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Sampel yang diambil
Bakalanpule	Pule	L	599	60
		P	608	61
	Bakalan	L	337	34
		P	380	40
	Tikung	L	217	22
		P	229	23
	Sekargeneng	L	126	13
		P	129	13
Jumlah DPT			2625	-
Total Sampel			-	266

Sumber data dalam penelitian ini yaitu kata-kata dan tindakan para responden sebagai data primer dari tulisan atau dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan responden sebagai data sekunder. Untuk memperoleh data-data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka digunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut: 1) Data primer merupakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian ataupun data yang bersumber dari responden sebagai narasumber yang berkaitan dengan pengaruh atau tidaknya Kiai terhadap partisipasi politik masyarakat di desa Bakalanpule. Data primer meliputi nama, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan alamat. 2) Data sekunder yaitu data pendukung dalam penelitian yang dapat diperoleh melalui laporan-laporan, dokumen-dokumen data dari Kantor Kepala Desa Bakalanpule.

Tahap-tahap penelitian dalam model penelitian ini yaitu perencanaan (*study* literatur, penyusunan angket), pendalaman (revisi angket jika perlu perbaikan, jika tidak perlu maka langsung pengumpulan data dengan penyebaran angket), analisis, pembahasan, dan

kesimpulan. Menurut Sugiyono (2009: 119) bahwa instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrument penelitian akan menentukan kualitas data yang dikumpulkan. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah instrumen lembar angket politik masyarakat untuk mengumpulkan data, sesuai dengan tujuan penelitian. Angket ini digunakan untuk mengukur besar tidaknya pengaruh kiai terhadap politik masyarakat selama Pemilihan Umum Kepala Desa berlangsung. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu lembar angket yang kemudian dianalisis menggunakan deskriptif kuantitatif dengan metode perolehan skor.

Setelah data terkumpul peneliti melakukan pemilihan secara selektif yang disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Sebelum dianalisis terlebih dahulu dilakukan pengolahan data. Pengolahan data melalui proses *editing* (penyuntingan) yaitu dengan memeriksa seluruh daftar pertanyaan yang sudah dikembangkan, *coding* (pengkodean), yaitu memberi tanda (symbol) pada angket yang sudah diisi responden, dan *tabulating* (tabulasi), yaitu menyusun dan menghitung data hasil pengkodean untuk disajikan dalam bentuk tabel.

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data statistik. Alat analisis yang digunakan berupa Deskriptif Kuantitatif, dan hasil angket akan dianalisis menggunakan rumus:

$$P = \frac{n}{N}$$

dengan keterangan (P) sebagai banyaknya jumlah pemilih dikalikan nilai tertinggi, dan (N) sebagai jumlah soal dikalikan jumlah responden. Adapun kriteria penilaian menurut skala *Guttman* (Darmawan, 2013:169) pada setiap jawaban dari masing-masing indikator dihubungkan dengan bentuk pernyataan sebagai berikut :

Tabel 3. Kriteria Penilaian Indikator

Jawaban	Skor
Ya	1
Tidak	0

Setelah hasil rata-rata dari indikator ditemukan, maka akan dicari hasil akhir berupa penilaian akhir dari seberapa besar pengaruh kepemimpinan Kiai terhadap partisipasi politik masyarakat di desa Bakalanpule. Untuk itu perlu adanya kriteria penilaian sebagai berikut :

Tabel 4. Kriteria Rubrik Penilaian Indikator

Skor	Kriteria
212,9 – 266,0	Sangat Tinggi
159,7 – 212,8	Tinggi
106,5 – 159,6	Sedang
53,3 – 106,4	Rendah
0 – 53,2	Rendah Sekali

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Hasil penelitian tentang Pengaruh Kiai terhadap Politik Pemilihan Kepala Desa Bakalanpule akan diuraikan untuk menjawab rumusan masalah bagaimana pengaruh Kiai pada Politik Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tikung Lamongan Kabupaten Lamongan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti (2016) bahwa tokoh masyarakat seperti Kiai menjadi pengaruh masyarakat dalam kehidupan sosial politik dan religi.

Tabel 5. Hasil Jawaban Responden

No	Nama Dusun	Frekuensi	Skor yang diperoleh tiap dusun
1	Tikung	45	38
2	Sekargeneng	26	22
3	Pule	121	100
4	Bakalan	74	61
Jumlah skor yang diperoleh		266	<b>221</b>

Dalam ruang lingkup pesantren, Kiai adalah unsur yang paling utama dibanding dengan unsur lainnya. Ia adalah orang yang paling bertanggung jawab meletakkan sistem yang ada dalam pesantren, sekaligus menentukan maju dan tidaknya sebuah pesantren. Tetapi di dalam masyarakat pedesaan, peran kiai tidak hanya pencerahan dalam urusan agama saja, tetapi lebih dari itu. Dalam urusan kesehatan misalnya, masyarakat pedesaan biasanya lebih percaya pada teknik pengobatan yang dilakukan oleh Kiai daripada harus periksa ke dokter atau klinik. Juga dalam urusan sosial yang lebih kompleks seperti mencarikan jodoh, memberikan nama kepada bayi yang baru lahir, dan urusan-urusan kehidupan yang lain. Oleh karena itu, kiai sangat diagungkan dan dihormati dalam masyarakat pedesaan.

Dukungan dari seorang Kiai kepada salah satu calon Kepala Desa nyatanya membuat masyarakat Bakalanpule untuk berpartisipasi politik dalam pemilihan Kepala Desa. Hal itu terbukti dengan skor yang diperoleh pada pernyataan bahwa masyarakat memilih calon politisi yang didukung oleh kiai sebesar 221 dengan kategori sangat tinggi sehingga masyarakat mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) dengan perolehan skor sebesar 264 dengan kategori sangat tinggi. Bersamaan dengan itu, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Faridl (2007) bahwa masyarakat masih kuat beranggapan bahwa secara normatif, kiai tetap dipandang sebagai sosok kharismatik yang memainkan peran-peran sosialnya secara signifikan. Kiai masih ditempatkan sebagai sumber "fatwa" terakhir ketika masyarakat berada di

simpang jalan di antara pilihan-pilihan politik yang membingungkan. Sementara di sisi lain, fenomena perubahan-perubahan struktur kognisi Kiai berkenaan dengan peran-peran sosial politik tersebut berkaitan erat dengan persepsi teologis yang dianutnya. Oleh karena itu, untuk memahami tarik-menarik antara peran ganda Kiai dalam rentang kehidupan sosial-politik dan agama, pada akhirnya tidak bisa dilepaskan dari usaha penelusuran akar teologis yang menjadi kerangka dasar perilaku sosial politik yang diperankannya.

Bentuk antusiasnya masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Desa dipengaruhi oleh Kiai, masyarakat selalu mengikuti kegiatan politik karena selain masyarakat mengetahui bahwa Kiai adalah orang yang adil dalam kepemimpinannya, dan mempercayai bahwa Kiai memiliki karomah dan barokah, sehingga membuat masyarakat menghormati Kiai melebihi penghormatan terhadap pejabat setempat (Bupati, Kepala Desa, dll). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Edi (2007) bahwa kharisma Kiai memperoleh dukungan masyarakat hingga batas tertentu karena dia dipandang memiliki kemantapan moral dan kualitas iman yang melahirkan model kepribadian magnetis bagi para pengikutnya. Oleh sebab itu, masyarakat memilih calon politisi yang didukung oleh Kiai dengan didukung pada hasil responden dari masyarakat Bakalanpule sebesar 221 dengan kategori sangat tinggi. Rudi (2011) pada hasil penelitiannya juga menyatakan bahwa pada era pemilihan kepala daerah langsung, Kiai sebagai elit lokal mempunyai nilai yang sangat berarti bagi calon pemimpin daerah. Dengan basis massa riil, Kiai dengan simbol-simbol agama merupakan modal yang signifikan dalam mendulang suara menuju kemenangan, terutama dalam rangka memobilisasi massa. Hal ini dikarenakan salah satu tugas pokok dalam rekrutmen politik adalah bagaimana elit yang ada dapat menyediakan kader-kader parpol berkualitas untuk duduk, terutama di kursi eksekutif maupun legislatif. Tarik-menarik kepentingan antara kandidat dan Kiai menjadi hal yang wajar. Kiai, dengan kharismanya mampu memobilisasi massa, sebaliknya kandidat pemimpin daerah mampu memberi berbagai fasilitas kepada Kiai. Saat pengajian berlangsung, Kiai secara terbuka menyampaikan dukungan terhadap calon pemimpin seperti Kepala Desa yang didukungnya. Pernyataan tersebut juga didukung dengan hasil responden masyarakat Bakalanpule yaitu sebesar 211 dengan kategori tinggi.

Meskipun masyarakat Bakalanpule memiliki hak pilih untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa dan memilih calon Kepala Desa yang Kiai dukung, namun masyarakat masih memiliki kebebasan untuk memilih calon pemimpin desa pada pemilihan Kepala Desa. Kiai

sering didatangi oleh berbagai macam orang yang berkepentingan politik, dan diketahui bahwa pengajian pernah dijadikan sebagai kampanye politik untuk mendukung calon politisi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasanah (2013) bahwa kedudukan Kiai masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama masyarakat pedesaan dan para jamaahnya. Hal tersebut sesuai dengan hasil responden yang diperoleh sebesar 206 dengan kategori tinggi.

Tabel 6. Hasil Jawaban Responden

No	Nama Dusun	Frekuensi	Skor yang diperoleh tiap dusun
1	Tikung	45	34
2	Sekargeneng	26	19
3	Pule	121	95
4	Bakalan	74	58
Jumlah skor yang diperoleh		266	<b>206</b>

Surbakti (2010:167) mengatakan Partisipasi Politik masyarakat bisa tergolong aktif, pasif, maupun golput. Hal tersebut terjadi karena adanya faktor yang mempengaruhinya seperti komunikasi politik, pengetahuan masyarakat, dan faktor fisik lingkungan. Sebagai warga Negara yang baik, masyarakat memiliki hak dan kewajiban terhadap adanya kegiatan politik. Oleh sebab itu Pendidikan politik penting untuk dapat mengenal dan memahami nilai-nilai ideal yang terkandung dalam sistem Politik, selain itu juga agar masyarakat menjadi warga Negara yang memiliki kesadaran tanggung jawab yang ditunjukkan dengan adanya perubahan sikap dan peningkatan kesadaran berpartisipasi politik. Dengan pengetahuan yang baik, tentunya masyarakat akan mudah memahami pentingnya politik dan ikut serta di dalamnya. Sebaliknya, ketika masyarakat memiliki pengetahuan yang sedikit akan politik, maka masyarakat akan acuh dan tidak peduli terhadap kegiatan politik. Karena Ramlan Surbakti (2010: 196) juga mengatakan Pengetahuan Masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan akan menentukan corak dan arah suatu keputusan yang akan diambil. Dengan kata lain, pengetahuan mengenai politik yang diberikan kepada masyarakat tidak serta merta dengan mudah diajarkan, walaupun dengan melalui sosialisasi. Hal tersebut membutuhkan proses agar masyarakat mengetahui pentingnya Pendidikan politik yang akan mempengaruhi keputusan masyarakat itu sendiri untuk memilih berpartisipasi pada pemilihan ataupun kepanitiaan. Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan angket yaitu masyarakat memahami tahapan pemilihan Kepala Desa dan memahami tujuan dari

diselenggarakannya pemilihan Kepala Desa yang keduanya mendapat respon positif terhadap masyarakat dengan mendapatkan jumlah masing-masing 226 dan 266 dengan kategori tinggi dan sangat tinggi. Seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 7. Rekapitulasi Data

No Soal	Pernyataan	Skor	Kategori
1	Mengenal sosok Kiai di pondok pesantren sebagai orang yang mempunyai daya bagi masyarakatnya.	166	Tinggi
2	Mengetahui bahwa Kiai adalah orang yang adil dalam kepemimpinannya.	198	Tinggi
3	Mempercayai bahwa Kiai memiliki karomah dan barokah yang menjadikan doanya dapat mudah diterima oleh masyarakat.	217	Sangat Tinggi
4	Mempercayai Kiai masih mampu menjadi sumber inspirasi perubahan dalam masyarakat.	179	Tinggi
5	Menghormati Kiai melebihi penghormatan terhadap pejabat setempat (Bupati, Kepala Desa, dll).	211	Tinggi
6	Masyarakat memilih calon politisi yang didukung oleh kiai.	221	Sangat Tinggi
7	Calon pemimpin meminta restu terhadap kiai.	221	Sangat Tinggi
8	Calon Kepala Desa harus mengikuti kegiatan jamaah kiai agar mendapat dukungan kiai.	179	Tinggi
9	Calon Kepala Desa harus selalu mengundang kiai dalam setiap acara agar mendapat dukungan dari kiai.	148	Sedang
10	Calon Kepala Desa yang mempunyai hubungan kerabat mendapat dukungan terhadap kiai.	182	Tinggi
11	Mengikuti kegiatan pengajian rutin yang diadakan oleh Kiai.	188	Tinggi
12	Pengajian pernah dijadikan sebagai kampanye politik untuk mendukung calon politisi.	206	Tinggi
13	Saat pengajian berlangsung, kiai menyampaikan dukungan terhadap calon pemimpin seperti Kepala Desa yang didukungnya.	211	Tinggi
14	Saat pengajian berlangsung, calon Kepala Desa juga mengikuti pengajian yang diadakan oleh kiai.	169	Tinggi
15	Saat pengajian berlangsung, calon Kepala Desa juga mengikuti pengajian yang diadakan oleh kiai.	186	Tinggi

Untuk terlibat dalam panitia pemilihan umum, respon masyarakat di desa Bakalanpule mendapatkan skor paling rendah yaitu sebesar 114 dengan kategori sedang. Hal tersebut karena faktor fisik lingkungan juga mempengaruhi partisipasi politik suatu masyarakat. Wajar jika warga desa Bakalanpule kurang mendapatkan pengetahuan tentang partisipasi politik, karena pada umumnya rutinitas ekonomi membuat pilihan politik bukan menjadi prioritas sehingga mempengaruhi cara

pandang mereka terhadap politik. Dalam kondisi seperti ini, peneliti tidak bisa mempermasalahkan masyarakat yang tidak terlibat dalam panitia baik itu pemilihan umum maupun panitia pemilihan Kepala Desa, karena ikut serta dalam partisipasi politik bukan kewajiban dan ada hal yang lebih penting seperti rutinitas ekonomi yang harus masyarakat jalani, bukan berpolitik.

Tabel 8. Rekapitulasi Data

No Soal	Pernyataan	Skor	Kategori
1	Mengikuti pertemuan tatap muka disertai dialog interaktif dengan salah satu pasangan calon Kepala Desa Bakalanpule.	211	Tinggi
2	Mengikuti pertemuan terbatas dengan salah satu pasangan calon Kepala Desa Bakalanpule.	218	Sangat Tinggi
3	Membantu pemasangan baliho/ spanduk/ poster calon Kepala Desa.	158	Sedang
4	Membantu mendirikan posko pemenangan pemilu.	159	Sedang
5	Turut serta menyebarkan jadwal kampanye calon Kepala Desa.	148	Sedang
6	Terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.	264	Sangat Tinggi
7	Mendatangi tempat pemungutan suara (TPS).	264	Sangat Tinggi
8	Mengetahui tata cara memberikan suara.	266	Sangat Tinggi
9	Mengenal calon yang akan dipilih.	190	Tinggi
10	Yakin bahwa calon yang akan dipilih merupakan yang terbaik dan tepat	144	Sedang
11	Terlibat dalam panitia pemilihan umum.	114	Sedang
12	Memahami peraturan-peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemilihan Kepala Desa.	157	Sedang
13	Memahami tugas pokok sebagai panitia pemilihan Kepala Desa.	158	Sedang
14	Memahami tahapan pemilihan Kepala Desa.	226	Tinggi
15	Memahami tujuan dari diselenggarakannya pemilihan Kepala Desa.	266	Sangat Tinggi

### Pembahasan

Berdasarkan oleh hasil penelitian Sholikhah (2014) bahwa sikap dan perilaku politik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa umumnya lebih berorientasi pada perasaan suka atau tidak suka daripada faktor pengetahuan calon Kepala Desa yang bersangkutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat tersebut di antaranya adalah keluarga, agama, sekolah dan kelompok pergaulan mereka. Sehingga meskipun pasif dalam berpartisipasi politik, namun masyarakat desa

Bakalanpule sangat antusias menggunakan hak pilihnya di Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan skor yang diperoleh pada pernyataan angket yaitu masyarakat mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) sebesar 264 dengan kategori sangat tinggi.

Partisipasi politik adalah sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat untuk mengambil bagian dalam proses Pemilihan Penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (Budiarjo, 1994:183). Partisipasi politik masyarakat hanya terlihat ketika ada Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur, ataupun Pemilihan Kepala Desa. Tidak ada kegiatan lain selain ikut serta dalam Pemilihan Kepala Desa tersebut. Masyarakat hanya mengetahui kegiatan Politik tersebut hanya sekedar Pemilihan Kepala Desa baik itu pemilihan Legislatif maupun Eksekutif. Dibawah ini adalah rekapitulasi jawaban responden pada variabel partisipasi politik masyarakat.

Berdasarkan kegiatannya, ada tiga macam Partisipasi Politik menurut Surbakti (2010: 167) yaitu Partisipasi Aktif, Pasif, dan Golput. Partisipasi Politik yang dilakukan oleh masyarakat desa Bakalanpule adalah partisipasi pasif. Mereka hanya mengikuti ketika adanya pemilihan Kepala Desa, tidak ada kegiatan Partisipasi Politik yang dilakukannya. Hal tersebut sesuai dengan skor yang diperoleh terhadap pernyataan membantu pemasangan baliho/ spanduk/ poster calon Kepala Desa yaitu sebesar 158 dengan kategori sedang, membantu mendirikan posko pemenangan pemilu sebesar 159 dengan kategori sedang, dan turut serta menyebarkan jadwal kampanye calon Kepala Desa sebesar 148 dengan kategori sedang. Partisipasi pasif menurut Ramlan Surbakti (2010: 142) yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

Politik masyarakat memiliki peran serta yang didasarkan kepada politik untuk menentukan suatu produk akhir. Sehingga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik, seperti suatu komunikasi yang mempunyai konsekuensi politik untuk mengatur perilaku manusia dalam keberadaan suatu konflik baik secara aktual maupun secara potensial, komunikasi politik antara rakyat dan pemerintah sebagai interaksi antara dua pihak yang menerapkan etika. Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan akan menentukan corak dan arah suatu keputusan yang akan diambil, dan faktor fisik individu sebagai sumber kehidupan termasuk fasilitas serta ketersediaan pelayanan umum. Faktor lingkungan adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya keadaan, kondisi dan makhluk hidup, yang berlangsungnya berbagai

kegiatan interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta Lembaga dan pranatanya.

Dalam kemunculan tokoh agama yang sering disebut dengan ulama, masyarakat kemudian mempercayai dan meyakini tokoh agama itu sendiri. Keyakinan masyarakat bermacam-macam bentuknya. Ada yang sekedar memiliki keyakinan bahwa tokoh agama tersebut hanya sebagai orang yang dapat menjadi tempat bertanya dan berdiskusi tentang agama, hingga ketika seseorang yang meyakini tokoh agama sebagai seseorang yang penting atau yang ikut andil dalam pengambilan keputusan dalam hidupnya.

Hingga saat ini kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agama masih kental dan terjadi pada sebagian besar warga masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan oleh berbagai aktivitas yang mengurus tenaga dan pikiran belum lagi masalah yang muncul dalam diri pribadi atau dalam keluarga, sehingga masyarakat pada umumnya menginginkan kesejukan, ketenangan dalam masing-masing pribadi yang menimbulkan keyakinan atau kepercayaan terhadap seorang tokoh agama itu sendiri dalam setiap individu. Kiai memiliki kekuatan supranatural yaitu karomah dan barokah sehingga bisa memahami sesuatu di balik sesuatu dan bisa memberikan peringatan berupa malate atau menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Karomah bisa dirasakan dan dialami oleh seseorang yang hanya yakin saja, dan keyakinan, masyarakat adalah sebuah barokah milik siapa saja. Artinya, setiap orang melakukan tabarukan atau mengambil barokah kepada kiai tertentu untuk mendapatkan tambahan kebaikan.

Hubungan personal antara kiai dan umat diikat dalam kemampuan memberikan barokah, karomah, dan upacara keagamaan sehingga semua pernyataan, fatwa, dan nasihat harus diterima secara pasif (mendengar dan mengerjakan).

Kepercayaan politik masyarakat merupakan komponen kognitif dari sikap masyarakat itu sendiri, dalam artian masyarakat mampu menilai baik dan buruknya dari pelaksanaan sistem politik yang dijalankan oleh suatu pemerintahan, sehingga masyarakat mampu mengambil sikap untuk ikut serta dalam artian yang aktif dalam pelaksanaan politik tersebut, atau hanya sebagai pelaku pasif dari kebijakan-kebijakan politik yang disahkan oleh pemerintah.

Kepercayaan politik yaitu angan-angan atau lebih tegasnya merupakan “buah pikiran nasional” seluruh warga bangsa, hasil konsensual dari sebuah kontrak social dalam sejarah pendirian Negara-bangsa sejak awal, tentang jalan politik dunianya secara umum.

Jadi, pada dasarnya kepercayaan politik merupakan keyakinan yang dimiliki oleh segenap elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga dan mempertahankan elektabilitas bangsa itu sendiri, sehingga akan tercipta

sikap saling percaya antara masyarakat dengan pemerintah yang menjadi ujung tombak berjalannya sebuah sistem pemerintahan. Sedangkan kepercayaan masyarakat terhadap elit politik pada dasarnya adalah anggapan atau keyakinan bahwa para elit politik yang mewakili kepentingan masyarakat dalam pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan program-program yang pada akhirnya untuk kepentingan rakyat.

Penelitian yang dilakukan oleh Lili Romli (2001), penelitian ini membahas tentang bagaimana strategi bangkitnya kalangan-kalangan Islam dalam dunia perpolitikan Indonesia sejak era reformasi hingga demokrasi seperti sekarang ini, menyebutkan bahwa jumlah partai dan tokoh-tokoh Islam yang memelopori kebangkitan dari politik kalangan Islam, namun tidak menyebutkan secara detail/jelas siapa saja tokoh maupun partai-partai yang melaksanakan peran-peran tersebut sehingga pembaca merasakan kerancuan dan ketidakpastian mengenai hal tersebut. Romli (2001) terlalu memusatkan hasil penelitian pada perolehan suara yang didapatkan oleh beberapa partai-partai Islam di pelaksanaan pemilu dari tahun ke tahun, namun tidak menuntun bagaimana strategi dari para kalangan tokoh politik Islam untuk dapat mempengaruhi suara masyarakat sehingga partai-partai yang diusungnya mampu mendapatkan tempat di jajaran elit kancah perpolitikan Indonesia.

Pada penelitian ini menjelaskan data dengan menggunakan tata Bahasa yang sangat baik, sehingga pembaca tidak mengalami kebosanan saat mendalami penelitian ini. Selain itu, mencantumkan aspek yang mempengaruhi suatu kemenangan dari kepala desa sehingga jelas bahwa untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat terdapat beberapa pengaruh salah satunya adalah Kiai, dimana Kiai ini memiliki Kharisma yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat.

Pada penelitian yang dilaksanakan di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan ini, peneliti lebih menekankan pada objek tertentu yaitu keberadaan Kiai pada suatu daerah tertentu sebagai subjek yang akan dihubungkan dengan pengaruhnya terhadap politik pemilihan Kepala Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. Selain itu pada penelitian ini ruang lingkup untuk partisipasi politik bukan hanya dalam wilayah pondok pesantren melainkan seluruh warga desa yang terdaftar dalam DPT desa Bakalanpule. Dimana kepala desa merupakan seseorang yang dapat memimpin pemerintahan desa dan melaksanakan segala tugas yang dibebankan oleh pemerintah yang lebih atas serta membimbing dan mengawasi segala usaha dan kegiatan masyarakat dan organisasi-organisasi serta lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa selain

itu kepala desa orang yang bergerak lebih awal, memelopori, mengarahkan, membimbing, menuntun dan menggerakkan masyarakatnya melalui pengaruhnya dan sekaligus melakukan pengawasan terhadap tingkah laku masyarakat desa yang dipimpinnya. Sehingga sangat penting dilakukannya pemilihan kepala desa yang bertujuan untuk memilih calon kepala desa yang dapat bersaing dalam pemilihan kepala desa untuk dapat memimpin desa. Pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa yang terdaftar dengan memilih langsung calon kepala desa yang dianggap oleh masyarakat mampu membawa aspirasi masyarakat dan pembangunan desanya.

Berdasarkan hasil tersebut Kiai dapat mempengaruhi politik pada pemilihan Kepala Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah, tujuan, hasil penelitian, dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat dibuat suatu simpulan bahwa pengaruh Kiai masih kuat, dibuktikan dari hasil rekapitulasi data pada tabel 7 pernyataan nomor 3 yang menyatakan bahwa masyarakat mempercayai Kiai yang memiliki karomah dan barokah yang menjadikan doanya dapat mudah diterima oleh masyarakat dengan mendapat skor sebesar 217 kategori sangat tinggi, maka calon Kepala Desa yang didukung oleh Kiai akan memenangkan pemilihan Kepala Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. Sehingga dalam penelitian ini Kepala Desa yang menang adalah calon yang didukung oleh Kiai. Hingga saat ini kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agama masih kental dan terjadi pada sebagian besar warga masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan oleh berbagai aktivitas yang menguras tenaga dan pikiran belum lagi masalah yang muncul dalam diri pribadi atau dalam keluarga, sehingga masyarakat pada umumnya menginginkan kesejukan, ketenangan dalam masing-masing pribadi yang menimbulkan keyakinan atau kepercayaan terhadap seorang tokoh agama itu sendiri dalam setiap individu. Selain itu, pada tabel 8 pernyataan nomor 11 bahwa untuk terlibat dalam panitia pemilihan umum, respon masyarakat di desa Bakalanpule mendapatkan skor paling rendah yaitu sebesar 114 dengan kategori sedang. Hal tersebut karena faktor fisik lingkungan yang juga mempengaruhi partisipasi politik suatu masyarakat. Wajar jika warga desa Bakalanpule kurang mendapatkan pengetahuan tentang partisipasi politik, karena pada umumnya rutinitas ekonomi membuat pilihan politik bukan menjadi prioritas sehingga mempengaruhi cara pandang mereka terhadap politik. Dalam kondisi seperti

ini, peneliti tidak bisa memperlakukan masyarakat yang tidak terlibat dalam panitia baik itu pemilihan umum maupun panitia pemilihan Kepala Desa, karena ikut serta dalam partisipasi politik bukan kewajiban dan ada hal yang lebih penting seperti rutinitas ekonomi yang harus masyarakat jalani, bukan berpolitik.

### Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, setelah mengumpulkan data, menganalisa dan menyajikannya, adapun saran yang diajukan oleh peneliti adalah menanamkan nilai demokrasi terhadap masyarakat dengan diadakannya sosialisasi agar masyarakat sadar akan hak serta kewajiban sebagai warga Negara Indonesia. Selain itu, dilakukannya penelitian selanjutnya yang serumpun agar penelitian ini dapat dikembangkan dan bisa dijadikan referensi pada penelitian selanjutnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam. 1994. *Partisipasi dan Partai Politik (sebuah bunga rampai)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Budiyono, Kabul. 2012. *Teori dan Filsafat Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta
- Bustami, Latif. 2009. *Kiai Politik, Politik Kiai*. Malang: Pustaka Bayan
- Darmawan, Deni. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Edi, Susanto. 2007. *Kepemimpinan [Kharismatik] Kyai Dalam Perspektif Masyarakat Madura*. Jurnal KARSA, Vol. 11 No. 1 hal: 30-40
- Faridl, Miftah. 2007. *Peran Sosial Politik Kyai di Indonesia*. Jurnal Sositologi. Edisi 11 hal: 238-243
- Huntington, P, Samuel. Nelson, Joan. 1990. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasanah, Imrotul. 2013. *Peran Kiyai Terhadap Pengambilan Keputusan Pemilih Dalam Pemilu Tahun 2013 Di Kabupaten Pamekasan*. Malang. Skripsi diterbitkan oleh Universitas Negeri Malang
- Romli, Lili. 2001. *Peran partai politik Islam sejak era reformasi sampai pada era demokrasi saat ini*. Universitas Negeri Surabaya. Skripsi tidak diterbitkan.
- Sholikhah, Amiroton. 2014. *Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Pada Masyarakat Desa Kutasari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap)*. Jurnal Komunika, Vol. 8, No. 1 hal: 79-97

Siti, Rohmatul Ainillah. 2016. *Elite Politik Dalam Kontenstasi Di Desa Dengan Menggunakan Studi Peran Blater Dalam Pilkades Di Desa Banjar, Galis, Bangkalan Madura*. Jurnal Politik Muda, Vol. 5, No. 3, hal: 282-290

Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia

